

**PENGARUH SIKAP WAJIB PAJAK PELAKSANAAN SANKSI DENDA,  
PELAYANAN FISKUS DAN KESADARAN PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada  
KPP Pratama Jakarta Senen)**

**Maria Irene Harefa**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta International School*

*Email: maria\_ireneh@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to demonstrate the influence of taxpayer attitudes toward administrative sanctions such as fines, taxpayer attitudes towards service tax authorities and taxpayer attitudes towards awareness of taxation on taxpayer compliance. The population in this study is the individual taxpayers in the KPP Jakarta, Senen Sub Bungur Primary cities in Central Jakarta, by the end of 2010, there were 1883 taxpayers OP is OP taxpayers effectively. Not all taxpayers effectively OP is the object of this study because the amount is very large and the efficiency of time and cost. Therefore do sampling. Sampling was done by the method of proportional sampling. The number of samples is determined 112 people. Primary data collection method used was a questionnaire method (questionnaire). The data analysis technique used in this study is multiple regression analysis techniques. The overall analysis in this study based on deterrence theory and social learning theory (social learning theory). The data were analyzed using a cross-section regression models with SPSS 21 software program at a significance level of 0.05 or 5%. The results of this study indicate that the 0.05 level taxpayer attitudes towards the implementation of administrative sanctions such as fines and service tax authorities significantly negative effect on tax compliance, while the attitude of taxpayers towards taxation awareness significantly positive effect on tax compliance.*

**Keywords:** *compliance taxpayer, taxpayer attitudes to administrative sanctions such as fines, taxpayer attitudes to service tax authorities and taxpayers stance on taxation consciousness*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh sikap wajib pajak terhadap sanksi administrasi berupa denda, sikap wajib pajak terhadap otoritas pajak layanan dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta, kota Senen Sub Bungur Primer di Jakarta Pusat, pada akhir 2010, ada 1.883 wajib pajak OP adalah OP pembayar pajak efektif. Tidak semua wajib pajak secara efektif OP adalah objek penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan efisiensi waktu dan biaya, oleh karena itu melakukan sampling. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling proporsional. Jumlah sampel ditentukan 112 orang. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode kuesioner (angket). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Analisis secara keseluruhan

dalam penelitian ini didasarkan pada teori pencegahan dan teori pembelajaran sosial (teori belajar sosial). Data dianalisis menggunakan penampang model regresi dengan program SPSS 21 software pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 0,05 sikap tingkat wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administratif berupa denda dan layanan otoritas pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan sikap wajib pajak terhadap perpajakan kesadaran efek positif secara signifikan pada kepatuhan pajak.

**Kata kunci:** kepatuhan, wajib pajak, sikap, sanksi administratif, denda, otoritas pajak, kesadaran perpajakan

## PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN.

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan instansi pemerintahan dibawah Kementerian Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru.

Namun terdapat kendala yang terjadi dalam memenuhi target penerimaan pajak oleh DJP tersebut. Kendala tersebut adalah berupa *tax ratio* (merupakan jumlah pajak yang berhasil dipungut di bandingkan dengan Pendapatan Domestik Bruto) yang rendah. *Tax ratio* Indonesia baru mencapai 14,64%. Nilai *tax ratio* ini masih dapat ditingkatkan, karena selama beberapa tahun terakhir ini jumlah WP senantiasa bertambah. Meskipun demikian tetap ada kendala dalam upaya meningkatkan *tax ratio*. Meskipun jumlah WP dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan WP (*tax compliance*).

Solich Jamin (2001) secara langsung menyatakan bahwa perlu peningkatan kepatuhan pajak guna meningkatkan *tax ratio*. Tingkat kepatuhan WP Badan dan WP OP ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan WP badan. Hal ini dapat terjadi karena WP Badan lebih cenderung menggunakan konsultan pajak bahkan mempekerjakan karyawan yang secara khusus mengurus masalah pajak perusahaan, berbeda dengan WP OP yang cenderung mengurus sendiri masalah pajaknya.

Di KPP Pratama Jakarta Senen tahun 2006 terdapat sebanyak 10.957 WP OP yang terdaftar. Namun, 8.802 WP OP yang efektif, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Jakarta Senen hanya 2.427 WP OP. Tingkat kepatuhan

WP OP di KPP Pratama Jakarta Senen senantiasa mengalami kenaikan tahun 2008 dan menurun pada tahun 2009 hingga tahun 2010. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian guna mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Senen.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan WP telah dilakukan oleh peneliti-peneliti. Solich Jamin (2001) meneliti mengenai perbedaan tingkat kepatuhan WP (gabungan WP Badan dan WP OP) yang ada di wilayah Jawa Tengah dan DIY pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Hasil penelitian Solich Jamin adalah bahwa terdapat perbedaan tingkat kepatuhan WP yang signifikan antara periode sebelum krisis ekonomi dan periode sesudah krisis ekonomi.

B.M. Sitorus (2003) juga melakukan penelitian yang relatif serupa dengan penelitian Solich Jamin, hanya saja secara khusus melakukan penelitian tentang kepatuhan WP badan pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi pada WP Badan pada KPP Jakarta Mampang Prapatan. Penelitian dilakukan dengan melakukan uji beda pada kedua periode tersebut. Hasil penelitiannya adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kepatuhan WP badan pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi. Kiryanto (2000) secara khusus melakukan penelitian terhadap tingkat kepatuhan WP Badan di KPP Jakarta dengan menggunakan variabel bebas lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. Hasil penelitiannya adalah bahwa lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suhardito (1996) berupaya untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya. Hasil penelitiannya adalah bahwa faktor-faktor yang melekat pada WP seperti kesadaran bernegara, pemahaman WP tentang UU, persepsi penghindaran pajak, persepsi tentang beban PBB dan status rumah WP tidak berpengaruh signifikan.

Fratnesi (2001) juga melakukan penelitian yang relatif sama dengan Bambang Suhardito (1996) dengan obyek penelitian di kota Bengkulu. Terdapat beberapa faktor yang tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB yaitu lama tinggal WP, pendapat WP tentang beban PBB dan rasio *permanent difference*. Sulud Kahono (2003) melakukan penelitian dengan kepatuhan WP PBB sebagai variabel terikat. Variabel bebas yang digunakannya adalah sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi administrasi berupa denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap penghindaran PBB. Hasil penelitian tersebut adalah variabel bebas yang digunakan baik secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PBB.

Suyatmin (2004) juga menggunakan beberapa variabel yang sama yaitu sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi administrasi berupa denda PBB, dan sikap WP terhadap pelayanan fiskus. Dengan menggunakan pula variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan sebagai variabel bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP PBB.

Dari uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang telah ada cenderung melakukan uji beda

kepatuhan WP sebelum dan sesudah krisis ekonomi (misalnya penelitian Solich Jamin, 2001 dan B.M. Sitorus). secara khusus mengkaji kepatuhan WP Badan (misalnya penelitian Kiryanto, 2000) dan mengkaji WP PBB (misalnya penelitian Bambang Suhardito, 1996; Fratnesi, 2001; Sulud Kahono, 2003; Suyatmin, 2004).

Tingkat kepatuhan WP OP terutama di KPP Pratama Jakarta Senen cenderung menurun tahun demi tahun. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Senen Kelurahan Bungur diketahui bahwa tingkat kepatuhan WP menurun dari tahun ke tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti sikap WP terhadap sanksi administrasi berupa denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan.

Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB. Sebagai contoh sikap WP terhadap pembangunan daerah dipandang kurang relevan untuk digunakan dalam penelitian WP OP karena pajak (bukan PBB) dari WP OP maupun WP Badan dikelola langsung oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah sebagaimana PBB. Variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara lebih bersifat umum, dan secara khusus hal tersebut dapat dicerminkan oleh kesadaran WP terhadap kesadaran perpajakan.

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Jakarta Senen Kelurahan Bungur pada tahun 2010 cenderung mengalami penurunan. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah “faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan WP OP di KPP Pratama Jakarta Senen Kelurahan Bungur?”.

Sementara itu beberapa penelitian yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan WP cenderung mengkaji WP Badan maupun WP PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan penelitian yang membutuhkan penelitian yang secara khusus mengkaji WP OP. Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan WP OP adalah sikap WP terhadap sanksi administrasi berupa denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan.

Variabel ini dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB (Sulud Kahono, 2003 dan Suyatmin, 2004). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Apakah sikap WP pada sanksi administrasi berupa denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Apakah sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Apakah sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk membuktikan pengaruh sikap wajib pajak pada sanksi administrasi berupa denda terhadap kepatuhan wajib pajak; (2) Untuk membuktikan pengaruh sikap wajib pajak pada pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak; (3) Untuk membuktikan pengaruh sikap wajib pajak pada kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Kontribusi Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

(1) Manfaat Akademik. Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian; (2) Manfaat Praktis. Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan sanksi pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Deterrence Theory*

Teori ini ditemukan oleh Gary Becker tahun 1968, yang dianugerahi Penghargaan Nobel dalam bidang Ekonomi tahun 1992. Berdasarkan penelitian Gary Becker berjudul *Crime and Punishment An Economic Approach*. Pada Tahun 2007, Ken Devos melakukan penelitian tentang *Measuring and Analysing Deterrence in Taxpayer Compliance Research*.

Untuk lebih memahami strategi audit dengan pendekatan *random*. Alm dkk. (1993) menggunakan *economics-of-crime methodology* yang pertama kali dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Mereka menemukan bahwa individu yang diasumsikan menerima pendapatan tetap akan menggunakan kewenangan pajak untuk melakukan *underreported income* dengan cara memaksimalkan fungsi utilitasnya dan menanggung akibatnya jika penghindaran pajaknya terdeteksi dan dikenakan pinalti.

Menurut *Deterrence theory*, Ken Devos (2007) meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak. Model ini menggabungkan fitur-fitur yang menonjol dari model sosial dan psikologi dalam mengukur efek jera dan dampaknya pada kepatuhan wajib pajak. Model ini meneliti mengenai peningkatan sanksi pidana sedemikian rupa untuk menghalangi pelaku mengulangi pelanggaran. Berdasarkan model ini, tindakan hukum dalam meningkatkan ancaman jera tidak hanya bagi para penjahat potensial dalam masyarakat, tetapi juga bagi mereka yang telah menerima hukuman dengan mengubah pandangan mereka dalam menanggapi ancaman hukuman di masa depan.

Model penelitian tentang kepatuhan pajak didasarkan pada pendekatan pencegahan ekonomi, yang menghubungkan kedua faktor ekonomi dan struktural dalam kaitannya pada kepatuhan. Pendekatan ini menggunakan persamaan fungsi utilitas dan eksperimental metode ekonomi untuk menjelaskan dan memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendekatan pencegahan ekonomi menunjukkan bahwa wajib pajak membuat evaluasi biaya dan manfaat (*cost benefit analysis*) ketika memutuskan untuk menentukan jumlah pajak terhutang dan hal ini berkaitan dengan aturan hukum yang berlaku di setiap negara.

Evaluasi biaya dan manfaat memaparkan bahwa kepatuhan evaluasi biaya murah dan manfaat merupakan prosedur yang cepat dan mudah serta pelayanan yang berkualitas sehingga kepatuhan pajak dapat terealisasi. Upaya pencegahan untuk menjelaskan perubahan kepatuhan perilaku daripada tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan pendekatan dari *economic models* adalah untuk mengidentifikasi kausalitas dalam perubahan perilaku wajib pajak dalam menanggapi perubahan variabel.

Menurut Ken Devos (2007) menyatakan bahwa memberikan ancaman hukuman merupakan strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Misalnya, *Australia Taxation Office (ATO)* telah dikenal dalam memberikan efek jera bagi wajib

pajak. Latar belakang dalam pencegahan ini dieksplorasi dari 3 (tiga) sudut pandang, yang meliputi aspek etika dan moral, ekonomi dan politik.

Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utamanya adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang diutamakan. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan sekitar.

Pada umumnya masyarakat disetiap negara memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Permasalahan tersebut timbul dari pemikiran bahwa membayar pajak adalah pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak.

Utilitas fungsi persamaan, metode ini menggunakan persamaan matematika aljabar yang menunjukkan bahwa wajib pajak rasional akan memaksimalkan utilitas yang diharapkan dari berjudi penggelapan pajak dengan menimbang utilitas yang diharapkan dari Pengurangan hutang pajak terhadap prospek deteksi dan hukuman secara pasti. Penelitian yang dihasilkan dengan metode ini bersifat teoritikal dan tidak didukung oleh data empiris. Temuan dari persamaan ini, yang meneliti perubahan variabel seperti tingkat pendapatan, tarif pajak, audit probabilitas dan denda tarif, adalah sebagai berikut: (1) Ada hubungan langsung antara tingkat audit dan menyatakan Pendapatan (kepatuhan akan meningkat jika ada peningkatan dalam audit probabilitas); (2) Ada hubungan positif antara tingkat hukuman dan kepatuhan; (3) Peningkatan tingkat pendapatan dan tarif pajak memiliki efek ambigu pada kepatuhan.

Grasmick dan Green (1980), Grasmick dan Scott (1982), Kaplan dan Reckers (1985) serta Reckers dkk. (1994), mendefinisikan etika dalam konteks perilaku ketidakpatuhan pajak sebagai sesuatu yang secara moral adalah salah atau tidak bermoral. Hasil riset mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara etika dan kepatuhan pajak, sedangkan riset yang menunjukkan hasil negatif ditunjukkan oleh Webley dan Eidjar (2001).

Riset yang secara spesifik menguji etika untuk memprediksi kepatuhan pajak dilakukan oleh Henderson (2005) dengan menginvestigasi efek dari orientasi etika dan evaluasi etika membuktikan bahwa orientasi etika mempengaruhi etika evaluasi dan selanjutnya secara positif mempengaruhi kepatuhan pajak. Proses psikologis dari etika pajak tergantung pada bagaimana *self-determination* dan *self-esteem* dipengaruhi oleh audit pajak, karena audit pajak dapat digunakan oleh lembaga pajak untuk meningkatkan moral pajak jika pembayar pajak memiliki *self-determination* yang tinggi (Deci;1999). Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa pada dasarnya perilaku individu berperan dalam menentukan keputusan yang akan diambil berkaitan dengan kepatuhan pajak.

Teori etika seperti teori *teological* memberikan pemahaman mendasar tentang bagaimana individu membuat keputusan dan menyadari dengan sepenuhnya atas setiap konsekuensi yang akan diterima dari setiap keputusan yang dibuatnya. Dengan demikian pemahaman ini sesuai dengan keputusan individu berkaitan dengan keputusan kepatuhan pajak, karena setiap keputusan yang akan diambilnya baik patuh atau tidak memiliki konsekuensi yang harus diterima.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi kompleksitas dari undang-undang pajak yang akan berdampak pada ketidakpastian hukum pajak, rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

### **Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)**

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura dalam Robbins, 2006). Teori ini merupakan perluasan teori pengkondisian operan dari Skinner (dalam Robbins, 2006) yaitu teori yang mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya.

Menurut Bandura (1977) dalam Robbins (2006). proses dalam pembelajaran sosial meliputi: (1) proses perhatian (*attentional*); (2) proses penahanan (*retention*); (3) proses reproduksi motorik; (4) proses penguatan (*reinforcement*).

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan diwilayahnya. Contoh penelitian yang menggunakan basis teori pembelajaran sosial ini adalah penelitian Agus Nugroho Jatmiko (2006).

Agus Nugroho Jatmiko (2006) adalah pengaruh sikap Wajib Pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP, dengan populasi wajib pajak orang pribadi (WP OP) di kota Semarang. Berdasarkan data KPP akhir tahun 2003 tercatat sebanyak 29.006 WP OP yang merupakan WP OP efektif, dengan sampel sebanyak 100 orang. Hasil kesimpulan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Karsimiati (2009) meneliti tentang pengaruh pelayanan fiskus, sanksi denda dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Populasinya adalah seluruh wajib pajak di Kecamatan Gabus-Pati sebanyak 16.578, dengan teknik *proportional stratified random sampling* diperoleh 100 responden. Hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Penelitian Terdahulu

Bambang Suhardito (1996) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di kota Surabaya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, rasio beda hitung *difference*, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda PBB, *tax avoidance*, pendidikan, lama tinggal WP, kesadaran bernegara, pemahaman WP tentang UU, persepsi WP bahwa penghindaran PBB telah umum, pendapat WP terhadap beban PBB dan status rumah WP. Variabel terikat yang digunakan adalah *collection rate*. Hasil penelitian Bambang Suhardito adalah bahwa variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap *collection rate* adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan beban WP, rasio beda hitung *difference*, sikap WP terhadap prioritas pembangunan pemerintah, persepsi WP tentang pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda PBB, *tax avoidance*, pendidikan, dan lama tinggal WP.

Kiryanto (2000) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan di DIY. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah lingkungan pengendalian, sistem akutansi dan prosedur pengendalian, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kepatuhan WP. Hasil penelitian Kiryanto (2000) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian, sistem akutansi dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP.

Fratnesi (2001) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan PBB di kota Bengkulu. Penelitian Fratnesi (2001) dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP terhadap penghindaran PBB, pendidikan WP, status tanah atau rumah WP, pendapat WP terhadap pelayanan fiskus, rasio beda hitung *difference*, pendapat WP tentang PBB dan lama tinggal WP. Variabel terikat yang digunakan adalah *collection rate*. Hasil penelitian Fratnesi (2001) adalah bahwa kesadaran perpajakan, rasio beban PBB dibandingkan pendapatan WP, sikap WP terhadap pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi denda PBB, pendapat WP terhadap penghindaran PBB, pendidikan WP, status tanah atau rumah WP, dan pendapat WP terhadap pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *collection rate*.

Solich Jamin (2001) melakukan penelitian yang menganalisis perbedaan kepatuhan wajib pajak (gabungan WP Badan dan WP OP) sebelum krisis ekonomi dan sesudah krisis ekonomi di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik uji beda dua rata-rata berpasangan (*paired sample t test*). Hasil penelitian Solich Jamin (2001) adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum krisis ekonomi dengan masa sesudah krisis ekonomi. B.M. Sitorus (2003) juga melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian Solich Jamin (2001). hanya saja B.M. Sitorus (2003) secara khusus mengkaji WP Badan yang ada di KPP Jakarta Mampang Prapatan. Hasil penelitian B.M. Sitorus (2003) juga mendukung hasil penelitian Solich Jamin (2001) bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara



kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum krisis ekonomi dengan masa sesudah krisis ekonomi.

Sulud Kahono (2003) melakukan penelitian tentang pengaruh dari sikap WP terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap WP terhadap sanksi administrasi berupa denda PBB, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap penghindaran PBB terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di KP PBB Jakarta Pusat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Sulud Kahono (2003) adalah bahwa semua variabel bebas yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP PBB baik secara parsial maupun bersama-sama.

Suyatmin (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sanksi administrasi berupa denda PBB, pelayanan fiskus, kesadaran bernegara dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KP PBB Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Suyatmin (2004) adalah bahwa semua variabel bebas yang digunakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB baik secara parsial maupun secara simultan.

Agus Nugroho Jatmiko (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kota Semarang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian Agus Nugroho Jatmiko (2006) adalah bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya beberapa diantaranya menguji beda kepatuhan wajib pajak pada masa sebelum dan sesudah krisis ekonomi untuk WP Badan (B.M. Sitorus, 2003) maupun gabungan WP OP dan WP Badan (Solich Jamin, 2001). Memfokuskan analisis pada WP Pajak Bumi dan Bangunan (Sulud Kahono, 2003 dan Suyatmin, 2004) serta WP Badan (Kiryanto, 2000). Menganalisis Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan di Kota Semarang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP, dengan teori atribusi (*attribution theory*) dan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) (Jatmiko, 2006).

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dari WP OP di Kota Jakarta Pusat dengan menggunakan beberapa variabel seperti sikap WP terhadap sanksi administrasi berupa denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan dan menggunakan *Measuring and Analysing Deterrence in Taxpayer Compliance Research* by Ken Devos (2007).

Adapun alasan pemilihan variabel dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Variabel sikap WP terhadap sanksi administrasi berupa denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan dipilih karena cenderung lebih sesuai dengan WP OP dibandingkan variabel-variabel yang juga telah digunakan pada penelitian tentang WP PBB (Sulud Kahono, 2003 dan Suyatmin, 2004). Sebagai contoh sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah dipandang kurang relevan untuk digunakan dalam penelitian WP OP karena pajak (bukan PBB) dari WP OP

maupun WP Badan dikelola langsung oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah sebagaimana PBB. Persamaan dalam penelitian sebelumnya yang dipengaruhi yaitu kepatuhan wajib pajak dan perbedaan lokasi penelitian dan teori yang mendasari dengan penelitian sebelumnya (Jatmiko, 2006). (2) Variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara tidak digunakan dalam penelitian ini. Alasannya adalah variabel sikap WP terhadap kesadaran bernegara lebih bersifat umum, dan secara khusus hal tersebut dapat dicerminkan oleh kesadaran wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan.

### Hipotesis

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak (Suyatmin, 2004). WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi administrasi berupa denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan WP terhadap sanksi administrasi berupa denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Sikap wajib pajak terhadap sanksi administrasi berupa denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar WP tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa (Miando Sahala L. Panggabean, 2002).

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris hal ini telah dibuktikan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak disektor perkotaan. Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak (fiskus) diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dinyatakan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan untuk diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Soemarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat

dijaring. Lerche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

## **METODE**

### **Jenis dan Sumber Data**

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Cooper dan Emory, 1996). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para WP OP yang ada di KPP Pratama Jakarta Senen Kelurahan Bungur. Data ini berupa kuesioner yang telah di isi oleh para WP OP yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder diperlukan dalam penelitian ini sebagai pendukung penulisan. Sumber data ini diperoleh dari berbagai sumber informasi yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga seperti KPP. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jumlah WP OP efektif, terdaftar dan WP OP yang menyampaikan SPT yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Senen, peran pajak dalam APBN diperoleh dari Berita Pajak.

Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan kajian literatur dari publikasi maupun data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Senen. Sementara itu metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan di ajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala empat angka yaitu mulai angka 4 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut: (1) Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS); Angka 2 = Tidak Setuju (TS); Angka 3 = Setuju (S); Angka 4 = Sangat Setuju (SS)

Sebelum daftar pertanyaan diajukan kepada seluruh responden penelitian, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas daftar pertanyaan (uji kuesioner) dengan sampel 15 responden. Tujuan pengujian daftar pertanyaan adalah untuk menghasilkan daftar pertanyaan yang reliabel dan valid sehingga dapat secara tepat di gunakan untuk menyimpulkan hipotesis. Suatu angket dikatakan reliabel jika mempunyai nilai Cronbach Alpha di atas 0,6 (Sekaran, 1992).

Sementara itu uji validitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan angket. Angket dikatakan valid akan mempunyai arti bahwa angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Syarat minimum yang harus dipenuhi agar angket dikatakan valid/sahih adalah lebih besar dari 0,239 (Imam Ghozali, 2006).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kualitas-kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami

sebagai sekelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah para WP OP yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Senen Kelurahan Bungur. Berdasarkan data dari KPP Pratama Jakarta Senen, hingga akhir tahun 2010 tercatat sebanyak 1.883 WP OP yang merupakan WP OP efektif. Tidak semua WP OP efektif ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel.

Pengambilan sampel dilakukan pada WP OP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Senen Kelurahan Bungur. Penentuan jumlah sampel untuk pada penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan saran Roscoe (1975) dalam Sekaran (1992) yang menyatakan bahwa: (1) Jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500; (2) Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariat (seperti analisis regresi berganda). ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar daripada jumlah variabel bebas (minimal 10 kali).

Sementara itu Hair et al. (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah  $4 * 20 = 80$ .

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Rao, 1996):

$$n = \frac{N}{1 + N (\text{moe})^2}$$

Dimana:  $n$  = jumlah sampel;  $N$  = populasi;  $\text{Moe}$  = margin of error max yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Jakarta Senen Kelurahan Bungur, hingga akhir tahun 2010 tercatat sebanyak 1.883 WP OP yang merupakan WP OP efektif. Maka jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{1.883}{1 + 1.883 (10\%)^2}$$

$$n = 95 = 100$$

Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 WP OP. Jumlah sampel ini sudah melebihi jumlah sampel minimal yang harus di ambil berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Hair et al. (1998).

### Definisi Operasional Variabel

Pada bagian ini akan di jelaskan mengenai definisi operasional variabel yang di pergunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**. Kepatuhan Wajib Pajak, E. Eliyani (1989) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan

melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Novak (1989) dalam Kiryanto (2000) yaitu wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin untuk 4 pertanyaan. **Kedua.** Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda yaitu sikap responden tentang pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda terhadap responden dan orang lain di sekitar responden (Suyatmin, 2004). Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin untuk 4 pertanyaan yang dikembangkan oleh Sulud Kahono (2003) dan Suyatmin (2004). **Ketiga.** Sikap WP terhadap pelayanan fiskus, merupakan sikap atau konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam merasakan bagaimana pelayanan fiskus yang sesungguhnya terjadi (Suyatmin, 2004). Variabel ini diukur dengan skala Likert 5 poin untuk 5 pertanyaan yang dikembangkan oleh Suyatmin (2004). Keempat. Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan yaitu sikap responden terhadap peranan perpajakan bagi kegiatan pembangunan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 4 poin untuk 4 pertanyaan yang digunakan oleh penelitian Suyatmin (2004) yang relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

### **Teknik Analisis**

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

Hair et al. (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair et al., 1998). Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Patuh} = a + \beta_1 \text{Sanksi} + \beta_2 \text{Fiskus} + \beta_3 \text{Sadar} + e$$

Dimana: Patuh : Kepatuhan WP; a : Konstanta;  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi; Sanksi : Sikap WP terhadap sanksi administrasi berupa denda; Fiskus : Sikap WP terhadap pelayanan fiskus; Sadar : Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan; e : Residual

### **Asumsi Klasik**

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Namun karena data yang di gunakan adalah data *cross section* maka uji autokorelasi tidak dilakukan.

### **Pengujian Hipotesis**

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial, sementara uji F dilakukan untuk menguji model penelitian. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, demikian pula sebaliknya.

Sementara itu pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 21.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki 64%, sisanya 36% berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 21 hingga 30 tahun 41%. Sementara itu sebanyak 11% responden berusia lebih dari 51 tahun, 40% antara 31 hingga 40 tahun, dan sisanya yaitu 8% berusia antara 41 hingga 50 tahun. Dilihat dari lama bekerja atau menjalankan usaha. Sebanyak 11% responden telah melakukan usaha selama lebih dari 20 tahun, 17% responden telah melakukan usaha antara 11 sampai 15 tahun, 41% responden telah melakukan usaha selama kurang dari 5 tahun, 25% responden telah melakukan usaha antara 6 sampai 10 tahun, dan sebanyak 6% responden telah melakukan usaha antara 16 sampai 20 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA (46%). 23% berpendidikan S1 hingga S2, 22% berpendidikan D1 hingga D3, 8% berpendidikan SMP, 1% berpendidikan SD.

Diketahui bahwa untuk pengisian SPT, sebagian besar responden 79%, menyatakan bahwa mereka mengisi sendiri SPT, 14% dibantu konsultan dan 7% menggunakan tenaga ahli. Sedangkan berdasarkan pengetahuan perpajakan, 47% responden menyatakan bahwa mereka memperoleh pengetahuan dengan cara belajar sendiri, 43% responden menyatakan bahwa memperoleh pengetahuan perpajakan melalui penyuluhan, 3% responden menyatakan bahwa mereka memperoleh melalui pelatihan, 7% memperolehnya melalui kursus (brevet).

### **Statistika Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian**

Statistika deskriptif variabel-variabel penelitian ini ditampilkan untuk mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan.

Variabel kepatuhan wajib pajak (Patuh) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,2. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah kepatuhan wajib pajak. Nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 2.75 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu nilai maksimum variabel kepatuhan wajib pajak

adalah sebesar 4 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda (Sanksi) memiliki nilai rata-rata sebesar 3.3. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda. Nilai minimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda adalah sebesar 2.75 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda. Sementara itu nilai maksimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda adalah sebesar 4 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda.

Variabel sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus (Fiskus) memiliki nilai rata-rata sebesar 3.1. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Nilai minimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus adalah sebesar 2.40 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus. Sementara itu nilai maksimum variabel sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus adalah sebesar 4 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus.

Variabel sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan (Sadar) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,3. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Nilai minimum variabel sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan adalah sebesar 3.37 yang artinya adalah pada umumnya responden yang menjawab setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan. Sementara itu nilai maksimum variabel sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan adalah sebesar 4 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan

### **Uji Reliabilitas dan Validitas Kuesioner**

Uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach Alpha di atas 0,60 (Sekaran, 1992, p. 287). Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat bahwa hasil koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 untuk tiga variabel penelitian yaitu variabel kepatuhan WP (Patuh) sebesar 0,969; sikap WP terhadap sanksi administrasi berupa denda (Sanksi) sebesar 0,938; sikap WP terhadap pelayanan fiskus (Fiskus) sebesar 0.518; dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan sebesar 0.968.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa instrumen untuk Fiskus memiliki angka reliabilitas yang sedang (Cronbach's Alpha = 0.518), karena menurut Nunnally (1967) dan

Hinkle (2004) ataupun indeks yang biasa digunakan dalam penelitian sosial, apabila angka Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) diatas 0.70 menunjukkan bahwa konstruk atau variabel adalah reliabel

Uji validitas angket dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan kuesioner. Kuesioner dikatakan valid akan mempunyai arti bahwa angket mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dari hasil uji validitas item yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat hasil korelasi untuk masing-masing item dengan skor total didapat *corrected item total correlation* untuk variabel-variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini yang ditampilkan pada tabel 5.3. Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik, karena syarat minimum yang harus dipenuhi agar angket dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,239 (Imam Ghazali, 2006) dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket dikatakan valid.

### Analisis Data. Pengujian Asumsi Klasik

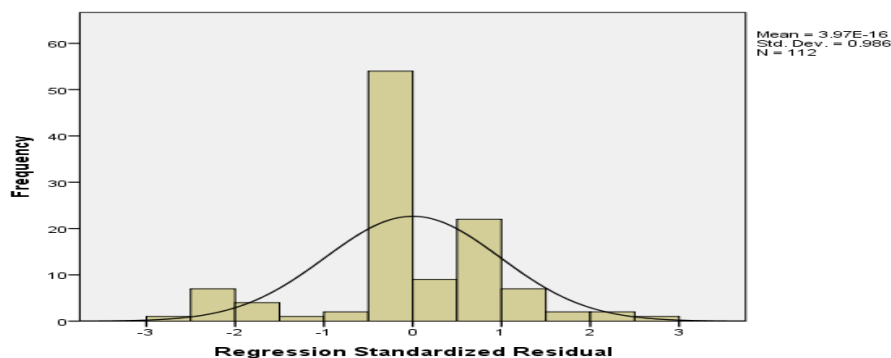
Suatu model dinyatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat -sifat *best linear unbiased estimator* (Gujarati, 2009). Disamping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi ekonometrik yang melandasinya.

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji Kolmogorov Smirnov satu arah untuk menguji normalitas data secara statistik, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser dan uji multikolinearitas dengan menggunakan *Variance Inflation Factors* (VIF). Uji otokorelasi tidak dilakukan karena data yang digunakan adalah data *cross section*.

### Uji Normalitas Data

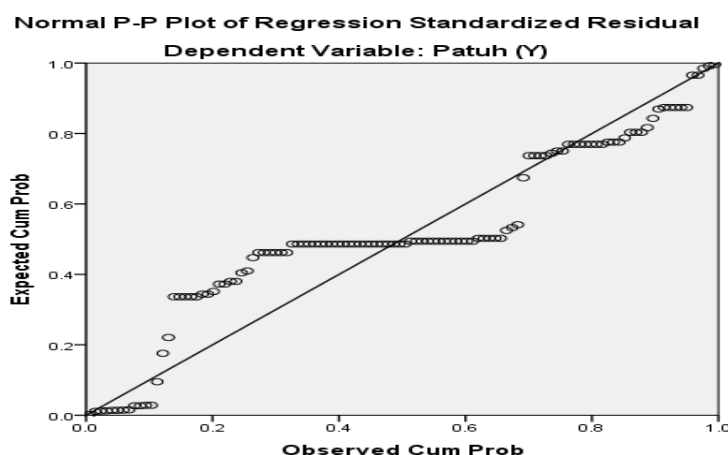
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas lebih ditekankan pada penelitian yang memakai data populasi (Gujarati, 2009). Model regresi yang baik adalah residual terdistribusi secara normal. Uji normalitas dari residual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *histogram standardized residual* dan PP plot *standardized residual*.

Pada Gambar berikut ini dapat dilihat *histogram standardized residual* dan PP plot *standardized residual*.



Gambar 1. Histogram Standardized Residual





**Gambar 2.** PP Plot Standardized Residual

Dari gambar 2 dan Gambar 3 dapat diketahui bahwa histogram *standardized residual* dan PP plot *standardized residual* menunjukkan pola data tidak normal. Pada grafik Normal Plot penyebaran data (titik-titik) agak menjauh dari sumbu diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data tidak normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas penting untuk mengetahui apakah varians dari setiap *error* bersifat heterogen. Apabila bersifat heterogen maka melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari *error* harus bersifat homogeny (Gujarati, 2009). Pengujian dilakukan dengan melihat adanya pola tertentu dari *scatterplot* yang menunjukkan hubungan antara *Regression Studentised Residual* dengan *Regression Standardized Predicted Value*. Dasar pengambilan keputusan berkaitan dengan gambar *scatterplot* tersebut adalah jika tidak terdapat pola yang jelas, yaitu jika titik-titiknya menyebar, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel mengalami heteroskedastisitas.

**Tabel 1.** Hasil Uji Glejser

Keterangan	t statistic	Signifikansi
SANKSI (H1)	1.629	0.106
FISKUS (H2)	-0.355	0.723
SADAR (H3)	10.68	0

Pada Tabel 1 nilai signifikan variabel H1 = 0.106 > 0.05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti variabel independen H1 parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai signifikan variabel H2 = 0.723 > 0.05 sehingga H0 tidak ditolak, yang berarti variabel independen H2 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

Sedangkan nilai signifikan variabel  $H_3 = 0.000 < 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak, yang berarti variabel independen  $H_3$  secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel  $Y$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas dalam persamaan regresi.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Apabila terjadi gejala multikolinieritas, maka dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut (Algifari, 1997): (1) Nilai koefisien regresi menjadi kurang dapat dipercaya; (2) Kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel-variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi. Apabila sebagian atau seluruh variabel bebas berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinieritas. Metode lain yang dapat dilakukan untuk menguji adanya multikolinieritas ini dapat dilihat pada *tolerance value* atau *Variance Inflation Factors (VIF)*. Batas *tolerance value* adalah 0,10 dan *Variance Inflation Factors (VIF)* adalah 10 (Hair et al., 1998 : 48). Jika nilai *tolerance value* di bawah 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* di atas 10 maka terjadi multikolinieritas. Nilai *tolerance value* semua variabel berada di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda.

### Pengujian Hipotesis

Sesuai dengan kaidah dalam melakukan analisis regresi berganda sebagaimana dinyatakan oleh Gujarati (2009), bahwa suatu persamaan regresi harus memiliki data yang terdistribusi normal, bebas heteroskedastisitas, dan bebas multikolinieritas agar diperoleh persamaan regresi yang baik dan tidak bias. Dari hasil uji normalitas data yang telah dilakukan maka diketahui bahwa data yang digunakan dalam persamaan regresi ini terdistribusi secara tidak normal, mengalami heteroskedastisitas, dan tidak terdapat multikolinieritas sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi berganda dengan baik.

Untuk menjawab masalah, mencapai tujuan dan pembuktian hipotesis serta untuk mengetahui apakah variabel eksplanatori secara parsial berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel terikat, maka perlu dilakukan uji  $t$ . Hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	Signifikansi
Konstanta	2.761	2.312	0.000
SANKSI	0.106	1.629	0.000
FISKUS	-0.022	-0,355	0.000
SADAR	0.695	10.68	0.000
Nilai F : 61.514*		$R^2$ : 0,631	

\* signifikan pada tingkat signifikansi 5%

Berdasarkan Tabel 2, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Patuh} = 2,761 + 0,106\text{Sanksi} + -0,022\text{Fiskus} + 0,695\text{Sadar} + e$$

### Pengujian Kelayakan Model

Persamaan regresi memiliki nilai F hitung sebesar 61,514 yang lebih besar daripada F tabel dengan derajat bebas (3 : 108) pada tingkat signifikansi 5% sebesar 2,39. Artinya adalah persamaan regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi hingga 5%. Ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penjelas nyata pada variabel terikat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak untuk digunakan. Sementara itu kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 63,1%, sementara 36,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**. Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP, sehingga tidak mendukung hipotesis sanksi. Hasil menunjukkan bahwa sikap wp terhadap pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. **Kedua**. Sikap WP terhadap pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP, sehingga tidak mendukung hipotesis fiskus. Hasil menunjukkan bahwa sikap wp terhadap pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. **Ketiga**. Sikap WP terhadap kesadaran perpajakan secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan WP. **Keempat**. Kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 63,1%, sementara 36,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini. **Kelima**. Perilaku individu berperan dalam menentukan keputusan yang akan diambil berkaitan dengan kepatuhan pajak. Teori etika memberikan pemahaman mendasar tentang bagaimana individu membuat keputusan dan menyadari dengan sepenuhnya atas setiap konsekuensi yang akan diterima dari setiap keputusan yang dibuatnya. Dengan demikian pemahaman ini sesuai dengan keputusan individu berkaitan dengan keputusan kepatuhan pajak, karena setiap keputusan yang akan diambilnya baik patuh atau tidak memiliki konsekuensi yang harus diterima. **Keenam**. Seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi kompleksitas dari undang-undang pajak yang berdampak pada ketidakpastian hukum pajak, rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh dari lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka implementasi kebijakan yang dapat diterapkan atas penelitian ini adalah: **Pertama**. Bagi Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sudah tepat, walaupun perlu diperhatikan dalam penerapannya sanksi administrasi berupa denda,

pelayanan fiskus dan kepatuhan perpajakan. Kebijakan perpajakan atas sanksi administrasi berupa denda yang berlaku sudah semakin terperinci. Kejelasan perlakuan pajak didasarkan pada suatu dasar hukum yang jelas dan kebijakan yang senantiasa mengikuti perkembangan dan inovasi wajib pajak, akan semakin diperlukan dimasa mendatang, seiring terus bertambahnya kontribusi pajak dalam pembangunan nasional dengan tetap memberi pelayanan yang baik kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku. **Kedua.** Bagi Wajib Pajak. Bagi para wajib pajak sebaiknya memahami aturan perpajakan dengan baik. Dari hasil penelitian ini faktor yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran. Dengan demikian implikasi kebijakan yang dapat diberikan dalam penelitian ini kepada wajib pajak bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya berupaya dalam peningkatan kesadaran perpajakan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pemasangan iklan pada media massa atau media cetak, dikarenakan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya wajib pajak akan patuh pada aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia apabila wajib pajak menyadari dan merasa yakin bahwa pajak merupakan sumber bagi pembangunan, pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah.

### Saran

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan penyempurnaan untuk penelitian yang akan datang, antara lain: **Pertama.** Penelitian ini hanya dilakukan pada satu KPP dan dibatasi pada satu kelurahan, sehingga hasil penelitian ini kemungkinan tidak sama hasilnya jika diaplikasikan pada beberapa KPP dengan populasi sampel lebih banyak. Pada peneliti selanjutnya disarankan penelitian dilakukan pada beberapa KPP dengan mempertimbangkan lokasi penelitian misalnya lokasi pemukiman yang berada diwilayah perkantoran, hal ini untuk mengetahui perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. **Kedua.** Periode yang diamati dalam penelitian ini relatif singkat, yaitu satu tahun. Pada peneliti selanjutnya disarankan penelitian dilakukan dengan dengan membandingkan hasil dari perubahan PTKP berdasarkan Tarif Pasal 17 Undang-Undang PPH (berlaku sampai dengan 31 Desember 2012) dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012, terhitung mulai 1 Januari 2013, sehingga dapat mengurangi bias dalam hasil analisis. **Ketiga.** Penelitian ini hanya dilakukan berdasarkan pada alat ukur (parameter) yang direferensikan hanya dalam daftar pustaka saja, sehingga hasil penelitian ini kemungkinan tidak sama apabila diaplikasikan pada alat ukur (parameter) yang tercantum selain dalam daftar pustaka ini. Pada peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat uji yang lain, sehingga hasilnya dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. **Keempat.** Sanksi administrasi berupa denda harus disosialisasikan dengan baik kepada para WP agar WP dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi administrasi berupa denda terhadap WP. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan secara gratis bagi para WP baru atau secara berkala mengirimkan pemberitahuan mengenai pelaksanaan sanksi administrasi berupa denda. **Kelima.** Fiskus harus bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para WP dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan WP agar dapat meningkatkan pelayanan fiskus bagi WP. Fiskus juga diseleksi dengan ketat sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan agar fiskus benar-benar cakap dalam melakukan tugasnya. **Keenam.** Perlu disosialisasikan

sikap sadar membayar pajak di masyarakat. Sosialisasi ini dapat melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya. Apabila diperlukan secara berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan. Hal ini dapat dilakukan pula dengan sosialisasi diprofesi-profesi tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional tertentu. **Ketujuh.** Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M.G., dan Sandmo, Agnar. (1972) Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1: 323-338.
- Alm, J., dan Michael McKee. (1998) Extending the Lessons of Laboratory Experiments on Tax Compliance to Managerial and Decision Economics. *Managerial dan decision Economics*, 19(June-August): 259-275.
- Alm James, B. R., Jackson, dan M., McKee,. (1992) "Estimating the Determinants of Taxpayer Compliance With Experimental Data". *National Tax Journal*, 45: 107-114
- Alm James, M. B., Cronshaw, dan M., McKee,. (1993) "Tax Compliance With Endogenous Selection Rules". *KYKLOS*, 46(1): 27-45.
- Alm James., I., Sanchez., dan Ana De Juan,. (1995) "Economic and Non-economic Factors in Tax Compliance". *KYKLOS*, 48(1): 8-18.
- Alm., J. (1988) Uncertain Tax Policies, Individual behavior and Welfare. *The American Economic Review*, 27: 237 - 245.
- Alm., J. (1991) A Perspective on the Experimental Analysis of Taxpayer Reporting. *The Accounting Review*, 66(3): 577-593.
- B, Ilyas Wirawan dan Richard Burton. (2010) *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.
- B.M. Sitorus (2003) "Analisis Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Bruce, Donald (2002) "Taxes and Entrepreneurial Endurance: Evidence From the Self-Employed," *National Tax Journal*, Vol. LV No. 1, hal 5 – 24.
- Data Pokok APBN 2006–2012 Kementerian Keuangan Republik Indonesia [http: www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id).
- Direktorat Jenderal Perpajakan, *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV/1 April 2003.
- Franzoni, Luigi A. (1998) *Tax Evasion and Tax Compliance, Encyclopaedia of Law and Economics*, B. Bouckaert and G. de Geest, eds., Edward Elgar and University of Ghent.
- Fraternesni (2001) "Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu", *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro*.

- Forest, Steven. M. (2002) Complexity and Compliance: An Empirical Investigation,” *National Tax Journal*, Vol. LV No. 1, p. 75 – 88.
- Ghozali, Imam. (2006) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2009) *Basic Econometric* (5<sup>th</sup> ed). Mc Graw-Hill.
- Hair, Joseph F, Ralph E. Anderson, Ronald L. Tatham, dan William C. Black (1998) *Multivariate Data Analysis*, Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc.
- Jamin, Solich. (2001) “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Pada KPP di Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta”, *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akutansi Universitas Diponegoro*.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006) “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi administrasi berupa denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang”, *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akutansi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Kahono, S (2003) “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang’, *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akutansi Universitas Diponegoro*.
- Ken Devos. (2007) “Measuring and Analysing Deterrence in Taxpayer Compliance Reasech”, *Journal Of Australian Taxation*. Vol. 15 No.2, hal 5 – 24.
- Lederman, Leandra (2004). *Tax Compliance and the Reformed IRS, Working Paper*, George Mason University School of Law.
- Lerche, Dietrich (1980) “Efficiency of Taxation in Indonesia”, *BIES*, Vol. 16 No.1, hal 34 – 51.
- Meinarni Asnawi. Zaki Baridwan. Supriyadi. Ertambang. (2009) “Analisis Keputusan Kepatuhan Pajak: Startegi Audit Random, Perceived Probability of Audit dan Pemahaman Etika Pajak (Studi Eksperimen Laboratorium)”. *Simposium Nasional 12*, Palembang.
- Miando Sahala H. Panggabean (2002) *Self Assessment, Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak*, *Berita Pajak*, No. 1462/Tahun XXXIV, p. 31 – 33.
- M. Said (2003) *Fenomena Pajak*, *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV, p. 21 – 26.
- Muliari, Setiawan. (2011) ”Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Akutansi & Bisnis*, Volume 6. No.1.
- Pruzhansky, Vitaly. (2004) *Honesty in A Signaling Model of Tax Evasion, Tinbergen Institute Discussion Paper*, Department of Economics, Vrije Universiteit Amsterdam.
- Riahi-Belkaoui, Ahmed. (2004) *Relationship Between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale, Working Paper*, University of Illinois at Chicago.
- Robbins.Stephen P. (2006) *Perilaku Organisasi*, PT INDEXKS Kelompok GRAMEDIA
- Saefudin, D (2003) *Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak*, *Berita Pajak*, No. 1492/Tahun XXXV, hal 24 – 28.
- Sekaran, Uma. (1992) *Research Methods For Business: Skill-Building Approach*, 2nd Editon, John Wiley & Sons, Inc.

- Soemarso S.R. (1998) Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia, *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia*, Vol. XLVI No. 3, hal 333 – 368.
- Soemitro, R. (1998) *Azas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama.
- Suyatmin. (2004) “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta”, *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akutansi Universitas Diponegoro*.
- Waluyo. (2010) *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Widarjono, Agus. (2010) *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Edisi 1. Jakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Wiyoso, Hadi. (2012) *Berapa sih sebenarnya Tax Ratio Indonesia?*. <http://www.pajak.go.id>.